

## RINGKASAN

**GITA GARTIKA MASRILAWATI**, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Pertanggungjawaban Notaris dan Implikasinya dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomer 2370/Pid.B/2021/PN.Sby), Komisi Pembimbing Ketua Dr. Budiyo, S.H., M.Hum. dan anggota Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya, oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam Putusan Nomor 2370/Pid. B/2021/PN. Sby, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Salinan Akta Persetujuan yang dibuat notaris telah di palsukan dari segi isi akta dan tandatangan para pihak oleh notaris Musdalifah atas permintaan Lim Chandra Sugiarto selaku direktur CV. Surya Mandiri Rattanindo. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum terhadap akta otentik yang dinyatakan palsu dalam Putusan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. dan mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris dalam hal terjadi pemalsuan akta otentik dalam Putusan Nomor 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. Metode penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, disajikan dalam bentuk teks naratif, disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian pertama, Implikasi hukum dari akta otentik yang di palsukan, sepanjang belum ada pembatalan maka akta tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, karena pada prinsipnya akta notaris itu adalah alat bukti yg sempurna. Akta itu benar sampai dibuktikan bahwa itu tidak benar, yaitu dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedua, implikasi pidana dari pelanggaran notaris dalam Putusan Nomor 2370/Pid. B/2021/PN. Sby berupa sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pertanggungjawaban yang dilakukan notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya, hal ini bisa terjadi jika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain sanksi Pidana, notaris dapat dikenakan sanksi Perdata dan sanksi Etik jika notaris melanggar berbagai ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci: Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

## SUMMARY

**GITA GARTIKA MASRILAWATI**, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University. *Notary Responsibility and Its Implications in the Crime of Forgery of Authentic Deeds (Decision Study Number 2370/Pid B/2021/PN Sby)*, Chairman Advisory Committee is Dr. Budiyono, S.H., M.Hum and member is Dr. Siti Kunarti, S.H., M.Hum.

Accountability carried out by a Notary as a result of carrying out their duties and positions, therefore the responsibility used in The Notary's Position Law is a liability based on fault. Actions performed by a notary can be held responsible for their violations for doing this on purpose and cause disadvantage for the parties. The principle of accountability used is accountability based on fault. The notary can be held accountable if there is an element of error in it. In Decision Number 2370/Pid. B/2021/PN. Sby, Amendment Deed Articles of Association and copy of Agreement Deed made by a notary has been faked in terms of the contents of the deed and signature the parties by notary Musdalifah at the request of Lim Chandra Sugiarto as the director of CV. Surya Mandiri Rattanindo. The purpose of this study is to examine and analyze the legal implications for authentic deeds which are declared fake in Decision Number 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. and reviewing and analyzing the responsibility of a notary in the event of falsification of an authentic deed in Decision Number 2370/Pid.B/2021/PN.Sby. The research was carried out with a legislation approach, a conceptual approach, a case approach, the research specifications are prescriptive. Collecting data with literature studies and interviews, presented in the form of narrative text, arranged systematically, and analyzed qualitatively normative.

The results of the first study, legal implication from the authentic deed has been faked, as long as there is no cancellation so the deed still has the force of law, because in principle the notarial deed is perfect evidence. The deed is true until it is proven that it is not true, that is by submitting an application to the Court to cancel the deed, so that the deed has no legal force. Second, the criminal implication of a notary violation in Decision Number 2370/Pid. B/2021/PN.Sby in the form of imprisonment for 1 (one) year. Accountability carried out by a notary is a result of the implementation of duties and positions, this can happen if the notary in carrying out his duties has fulfilled the elements of certain offenses of a crime based on the Criminal Code. Besides criminal sanctions, a notary may be subject to civil sanctions and Ethical sanctions if the notary violates various provisions listed in the Notary Code of Ethics, Position Law, and other laws and regulations.

**Keywords:** Notary, Criminal Accountability, Crime of Forgery of Authentic Deeds